

Satgas Terpadu Parmout Perkuat Patroli Pembersihan Sisa Karhutla

SULTENG RAYA - Satuan tugas (satgas) terpadu Parigi Moutong, terus memperkuat kegiatan patroli dan pembersihan sisa-sisa bara api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area-area terdampak.

“Sekarang lebih kepada kegiatan patroli sembari pembersihan sisa bara api menggunakan alat manual berupa tanki semprot,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong Moh Rivai di hubungi dari Palu, Selasa.

Ia menjelaskan sebagian besar area terdampak telah

teratasi, hanya saja masih terdapat sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan kebakaran, karena bara api belum sepenuhnya padam. Ditambah kondisi medan yang sulit dijangkau ke titik tersebut, karena berada di atas gunung dengan waktu tempuh berjalan kaki sekitar 60 menit.



PETUGAS dan warga berupaya memadamkan api akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Avolua, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (5/2/2026). **FOTO: ANTARA/MOH RIDWAN**

“Kondisi ini menjadi tantangan kami di lapangan, meski begitu kami optimis situasi ini bisa diatasi berkat kekompakan tim di lapangan,” ujarnya.

BPBD juga meminta pemerintah kecamatan dan desa segera merampungkan pendataan lahan warga yang terdampak karhutla, untuk dilaporkan kepada Kepala daerah guna tindak lanjut penanganan.

Data sementara dirilis tim terpadu penanggulangan karhutla, luas lahan terdampak sekitar 149,2 hektare dari sebelumnya 147 hektare.

“Hingga hari ke sembilan bencana karhutla, kami terus

bersiaga sembari membersihkan sisa-sisa bara api, supaya tidak berpotensi menimbulkan kebakaran,” ucapnya.

Ia juga menanggapi usulan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat setempat dalam urusan edukasi dan penegakan hukum bagi warga yang melakukan pembakaran lahan.

“Usulan itu bagus, kami segera mengadakan pertemuan dewan adat, rokok masyarakat maupun tokoh agama setempat, sebagai upaya pencegahan dan pelibatan masyarakat dalam penanggulangan karhutla,” tutur Rivai. **ANT**

FAJAR ALAMRI

Bocah 5 Tahun Asal Tolitoli Tampil di Turnamen Biliar Internasional



VIDEO Fajar Alamri viral di dunia maya. **FOTO: INSTAGRAM/@CARABAOINTERNATIONALOPEN**

SULTENG RAYA - Nama Fajar Alamri mencuri perhatian di ajang Carabao International Open (CIO) 2026. Bocah berusia 5 tahun asal Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah (Sulteng), ini tampil di turnamen biliar internasional yang diikuti ratusan peserta dari puluhan negara.

Baca **BOCAH** Hal. 7



SULTENG RAYA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tengah menyiapkan skema pelaksanaan operasi pasar murah sebagai upaya menekan kenaikan harga pangan, pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang

Ramadhan 2026. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah Richard Ar-

DISPERINDAG SULTENG

Gelar Operasi Pasar Tekan Harga Jelang Ramadhan



WARGA Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, membeli bahan pangan berupa beras dan minyak goreng pada kegiatan operasi pasar murah menjelang Ramadhan 2026, Selasa (10/2/2026). **FOTO: ANTARA/MOH SALAM**

naldo mengatakan pelaksanaan operasi pasar murah tersebut menyediakan lima ton beras untuk masyarakat Kabupaten Sigi.

“Jadi, selama dua hari pelaksanaannya di Kabupaten Sigi menyediakan stok beras 5 ton, 1,4 ton gula pasir,

minyak goreng 2,5 ton, telur 600 rak, 200 ekor ayam, bawang putih dan bawang merah masing-masing 20 kilogram,” kata Richard saat ditemui awak media di Kalukubula, Sigi, Sulteng, Selasa.

Baca **DISPERINDAG** Hal. 7

PERTAMINA SULAWESI

Luncurkan Program CANDI POSITIF, Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat Pesisir



KEGIATAN CANDI POSITIF (Posyandu Pesisir Sehat dan Aktif) di Posyandu Matahari III, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Barat I. **FOTO: IST**

SULTENG RAYA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal (IT) Bitung meresmikan Program CANDI POSITIF (Posyandu Pesisir Sehat dan Aktif) di Posyandu Matahari III, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Barat I. Program ini menjadi bagian dari upaya penguatan layanan kesehatan masyarakat pesisir melalui pendekatan terintegrasi, berkelanjutan, dan ber-

basis kebutuhan lokal.

Posyandu diposisikan sebagai titik awal peningkatan derajat kesehatan masyarakat pesisir yang selama ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari persoalan lingkungan, sanitasi, hingga rendahnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas kesehatan masyarakat, khususnya nelayan yang memiliki tingkat

Baca **PERTAMINA** Hal. 7

MERIAHKAN VALENTINE

Kapolda Sulteng Dijadwalkan Lepas Peserta Pacar-Run

SULTENG RAYA – Merayakan bulan kasih sayang dengan semangat positif, Bateman Production bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu akan menggelar rangkaian acara bertajuk “Valentine Night: Song for Love” dan olahraga lari “Pacar-RUN”, yang dipusatkan di 168 House, Jalan Setia Budi, Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu pada Sabtu dan Minggu (14-15/2/2026).

Rangkaian acara ini, direncanakan akan dibuka dan dilepas secara resmi oleh Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi. Acara Valentine Night “Song for Love” akan diisi dengan harmoni musik dari deretan musisi hits Sulawesi Tengah diantaranya The Mangge, Trezhil, Aci The Box, Sweet Layla, dan Celebes Drum Percussion dan untuk tiket bisa didapatkan secara langsung (On The Spot) di 168 House dan di Coffee Beans Cafe (Jalan Pemuda).

Sementara, pada minggu pagi masyarakat diajak untuk hidup sehat melalui agenda lari santai

“Pacar-RUN”. Mengambil titik start dan finish di 168 House, kegiatan ini dirancang untuk memadukan olahraga, hiburan, dan apresiasi, dimana dijadwalkan peserta akan dilepas langsung Kapolda Sulteng.

“Nantinya akan ada juga kampanye Anti Narkoba oleh pihak BNN, dan tentunya juga akan ada penarikan undian door prize serta dimeriahkan band atau musisi Kota Palu,” ujar Promotor Bateman Production, Steve Oy, belum lama ini.

Dia mengatakan, mengingat tingginya antusiasme peserta, maka kuota peserta untuk Pacar-Run sangat dibatasi. Olehnya masyarakat diharapkan segera mendapatkan slot pendaftaran agar tidak ketinggalan momen bersejarah tersebut.

Steve menjelaskan, tujuan dari kegiatan tersebut mengedukasi generasi muda bahwa kebahagiaan dan kasih sayang yang sejati dapat dirayakan dengan sehat tanpa ketergantungan pada hal-hal negative seperti penggunaan narkoba dan hal-hal lainnya. **AMR**



PELAKU berinisial WA, saat diamankan di Mapolres Parmout bersama sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, Kamis (27/11/2025). FOTO: DOK.SATRESNARKOBA PARMOUT

Bhayangkari Sulteng Berbagi di SD Inpres Balumpewa

SULTENG RAYA – Ketua Bhayangkari Daerah Sulawesi Tengah, Ny.Ida Endi Sutendi, menghadiri kegiatan bakti sosial Bhayangkari Peduli dengan menyalurkan bantuan pendidikan kepada siswa dan pihak sekolah SD Inpres Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di SD Inpres Balumpewa, Jalan Air Terjun Wera, Desa Balumpewa, ini merupakan wujud kepedulian Bhayangkari terhadap dunia pendidikan serta upaya mendukung peningkatan kualitas belajar anak-anak di wilayah pedesaan.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bhayangkari Daerah Sulteng didampingi oleh Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Sulawesi Tengah Ny.Helmi Kwarto, Ketua Bhayangkari Cabang Sigi, para pengurus Bhayangkari Daerah Sulteng, Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dr Helmi Kwarto Kusuma

Putra Rauf, Kabid Propam Polda Sulteng Kombes Pol Roy Satya Putra, serta perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sahrul.

Bantuan sosial yang diberikan kepada para siswa berupa sepatu sekolah, baju seragam, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan penunjang belajar lainnya. Selain itu, Bhayangkari juga menyerahkan bantuan berupa bingkisan kepada para guru sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Bantuan untuk sekolah diberikan dan diterima langsung oleh Kepala Sekolah SD Inpres Balumpewa, berupa laptop, printer, serta bantuan operasional sekolah guna mendukung proses belajar mengajar.

Pada kesempatan yang sama, bantuan dari Kapolda Sulawesi Tengah juga diserahkan oleh Wakapolda Sulteng kepada ketua adat desa setempat sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat

serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Djoko Wienartono, mengatakan bakti sosial ini merupakan bentuk nyata sinergi Polri dan Bhayangkari dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

“Melalui program Bhayangkari Peduli ini, kami ingin menghadirkan kehadiran Polri dan Bhayangkari yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” ujar Kabid.

Ia juga berharap bantuan yang diberikan dapat menambah semangat belajar para siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan di SD Inpres Balumpewa.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita, serta membantu pihak sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan sehari-hari,” ujarnya. **AMR**



SEJUMLAH personel polri dan pemerintah kelurahan, saat melaksanakan kerja bakti massal di area Penggaraman Pantai Talise, Selasa (10/2/2026). FOTO: HUMAS POLRESTA PALU

Kerja Bakti Massal, Upaya Mengajak Masyarakat Peduli Lingkungan

SULTENG RAYA – Personel Polresta Palu bersama Personel Polda Sulawesi Tengah menggelar kegiatan kerja bakti massal (korvei) dalam rangka memberikan edukasi serta mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga kelestarian alam. Kegiatan tersebut bertempat di Pantai Penggaraman Talise, Kelurahan Mantikulore, Kota Palu, Selasa (10/2/2026) pagi.

Kegiatan dipimpin langsung Kabagops Polresta Palu, Kompol I Dewa Gede Meiriawan, dengan melibatkan personel Polresta Palu dan Polda Sulteng. Gede Meiriawan mengatakan, kegiatan tersebut bukan hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan bersama-sama menjaga kelestarian alam.

“Sinergi antara Polresta Palu dan Polda Sulteng dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau aparat semata,” jelasnya.

Melalui kerja bakti massal ini, diharapkan tercipta lingkungan pantai yang bersih, sehat, dan lestari, sekaligus menumbuhkan budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat Kota Palu. **AMR**

ANGGOTA PRAMUKA POLRESTA PALU

Diharapkan Jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

SULTENG RAYA – Anggota Pramuka Saka Bhayangkara Polresta Palu melaksanakan kegiatan Krida Lalu Lintas (Krida Lantas), guna membantu kepolisian untuk mengatur kelancaran lalu lintas serta memotivasi generasi muda agar tertib ketika berkendara di jalan raya. Kegiatan itu dilaksanakan di simpang empat Jalan Dr. Soeharso, Kelurahan Besusu Barat, Kota Palu, belum lama ini.

Sejumlah anggota Pramuka melakukan pengaturan arus lalu lintas, membantu penyeberangan pejalan kaki, serta menyampaikan imbauan tertib berlalu lintas kepada para pengguna jalan.

Kegiatan ini bukan sekadar latihan keterampilan, tetapi representasi nyata peran sosial Pramuka sebagai mitra Polri dalam menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan

Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas) di wilayah Kota Palu.

Kasat Binmas Polresta Palu, AKP Hariadi Sabidin, selaku Mabi Saka Bhayangkara Polresta Palu, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pembinaan karakter generasi muda.

“Kegiatan Krida Lantas ini adalah bagian dari pembinaan karakter dan kedisiplinan generasi muda. Saka Bhayangkara tidak hanya dibentuk sebagai simbol kemitraan Polri, tetapi sebagai kekuatan sosial yang hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Hariadi.

Ia menambahkan, keberadaan Saka Bhayangkara haruslah menjadi solusi sosial, bukan sekadar organisasi simbolik yang hanya aktif dalam kegiatan seremonial.

“Kami ingin anggota Saka Bhayangkara menjadi pelopor kesela-

matan berlalu lintas, bukan hanya taat aturan, tetapi mampu mengedukasi lingkungan sekitarnya. Inilah model pembinaan yang berkelanjutan dan berdampak langsung,” tegasnya.

Keterlibatan aktif anggota Saka Bhayangkara di simpang jalan ini menjadi potret kontras, di satu sisi masih kuatnya budaya melanggar aturan, di sisi lain tumbuh generasi muda yang justru mengambil peran pengabdian. Mereka tidak sekadar belajar teori, tetapi mempraktikkan langsung nilai disiplin, kepedulian sosial, dan tanggung jawab publik.

Lebih dari sekadar pengaturan lalu lintas, kegiatan ini mencerminkan arah pembinaan Saka Bhayangkara yang progresif, mencetak generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, serta berani tampil sebagai agen perubahan. **AMR**



SEJUMLAH anggota Pramuka Saka Bhayangkara Polresta Palu, saat turun ke jalan membantu kepolisian mengatur arus lalu lintas di simpang empat Jalan Dr.Suharso, Kelurahan Besusus Barat, belum lama ini. FOTO:DOK.BINMAS POLRESTA PALU

Polda Sulteng Raih 3 Emas di Kejuaraan Silat Militer Nasional

SULTENG RAYA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Tim Silat Militer Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam ajang Kejuaraan Silat Militer Piala Pangdam XXIII/ Palaka Wira, Kategori TNI-Polri.



PARA atlet silat Polda Sulteng yang bertarung di ajang Kejuaraan Silat Militer Piala Pangdam XXIII/ Palaka Wira, Kategori TNI-Polri. FOTO: DOK POLDA SULTENG

pil gemilang. Moh. Yudi, Ta Kompi 1 Yon C Pelopor sukses menyumbangkan medali emas di kelas B Putra, disusul Moh. Asier, Ba Ditreskrimum yang meraih medali emas di kelas D Putra.

Prestasi semakin lengkap setelah Moh. Sucipto, Ba SPN keluar sebagai peraih medali emas pada kelas Seni Tunggal. Sementara, Abd. Mas ud,

Ta Satbrimob Polda Sulteng berhasil meraih medali perak di kelas E Putra, dan Moh. Mahadani Aprilio, Ba Kompi III Yon A Pelopor Satbrimob Polda Sulteng menyumbang medali perak di kelas F Putra.

Keberhasilan tim Polda Sulteng tidak lepas dari peran dan pendampingan official, Ipda Stephnus Anando, yang sehari-hari menjabat sebagai Kanit

Riksa 1 Subbid Provos Polda Sulteng dan sang pelatih Moh Fadil selaku Ba Ditreskrimsus Polda Sulteng.

Dengan kepemimpinan, kedisiplinan, serta dukungan moril yang kuat, Ipda Stephnus Anando yang juga pelatih Judo dari PJSI Sulteng dan sang pelatih tim Polda Sulteng Moh Fadil, mampu mengawal para atlet hingga tampil mak-

simal di setiap pertandingan.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienartono memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil dari latihan yang disiplin, semangat juang yang tinggi, serta kerja sama tim yang solid.

"Keberhasilan Tim Silat Militer Polda Sulteng meraih 3 emas dan 2 perak merupakan kebanggaan bagi institusi. Ini menunjukkan bahwa personel

Polri tidak hanya profesional dalam tugas kepolisian, tetapi juga berprestasi di bidang olahraga bela diri," ujar Kombes Pol Djoko Wienartono.

Ia juga menambahkan bahwa prestasi ini menjadi bukti pembinaan personel yang berkelanjutan di lingkungan Polda Sulteng, khususnya dalam mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sportivitas.

Lebih lanjut, Kabid Humas berharap capaian tersebut

dapat menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Polda Sulteng di tingkat regional maupun nasional. "Harapan kami, prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. Semoga atlet-atlet Polda Sulteng terus berlatih, berjuang, dan mampu meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, sekaligus membawa nama baik Polri dan daerah Sulawesi Tengah," jelasnya.

Enam Pegawai LPKA Palu Resmi Dilantik Kenaikan Pangkat

SULTENG RAYA - Momentum membanggakan menyelimuti jajaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. Setelah melewati proses seleksi ketat dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) beberapa waktu lalu, sebanyak enam orang pegawai LPKA Palu resmi mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) kenaikan pangkat, Senin (9/2/2026).



KEPALA LPKA Palu, Welli (tengah) saat berpose bersama enam pegawai yang dilantik, Senin (9/2/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

Acara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah (Sulteng) ini menjadi babak baru bagi para pegawai dalam meniti karier dan meningkatkan pengabdian kepada negara.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Sulteng, Bagus Kurniawan, dalam amanatnya menegaskan bahwa kenaikan pangkat adalah bentuk apresiasi sekaligus tanggung jawab besar yang dititipkan oleh institusi. "Sumpah jabatan, kenaikan pangkat, dan penghargaan ini bukan sekadar seremoni formalitas semata, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja nyata di lapangan," tegas Bagus Kurniawan dihadapan para peserta upacara.

Dirinya juga mengingat-

kan seluruh pegawai untuk terus menjunjung tinggi nilai integritas dan berperan aktif sebagai agen perubahan dalam semangat Reformasi Birokrasi. Kakanwil menekankan pentingnya implementasi core value BerAKHLAK serta tata nilai Kemenimipas PRIMA (Profesional, Responsif, Inovatif, Maju, dan Akuntabel) dalam setiap aspek pelayanan.

Kepala LPKA Palu, Welli, yang hadir langsung mendampingi jajarannya, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian keenam pegawainya. Menurutnya, kenaikan pangkat ini diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi seluruh staf di LPKA Palu untuk terus

berinovasi.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kompetensi pegawai. Dengan kenaikan pangkat ini, saya berharap keenam pegawai tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, terutama dalam memberikan pelayanan yang humanis dan berdaya saing bagi anak binaan maupun masyarakat," ujar Welli.

Melalui pelantikan ini, diharapkan sistem pemasyarakatan di Sulawesi Tengah, khususnya di LPKA Palu, semakin maju dan mampu memberikan pelayanan terbaik yang selaras dengan transformasi birokrasi masa kini.

Bukan Sekadar Edukasi, LPKA Palu Ajak Anak Binaan "Melek" Kesehatan Reproduksi



ANAK binaan LPKA Palu saat mengikuti Games Edukatif dalam kegiatan bertajuk "Edukasi Kesehatan Reproduksi sesuai Siklus Hidup Termasuk Kelompok Resiko Tinggi" pada Kamis (5/2/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

SULTENG RAYA - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, terus berkomitmen dalam memberikan pemenuhan hak kesehatan bagi anak binaan.

Bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, LPKA Palu menyelenggarakan kegiatan bertajuk "Edukasi Kesehatan Reproduksi sesuai Siklus Hidup Termasuk Kelompok Resiko Tinggi" pada Kamis (5/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Belajar LPKA Palu itu, diikuti oleh 19 orang anak binaan dengan penuh antusias. Program ini dirancang untuk memberi-

kan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sebagai bagian dari persiapan masa depan yang lebih baik.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulawesi Tengah, Tenny Calvenny Soriton, S.Sos, MM. Dalam sambutannya, menekankan pentingnya pendampingan bagi remaja, terutama mereka yang berada di lingkungan pembinaan.

"Setiap remaja memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses informasi kesehatan yang benar. Melalui edukasi ini, kami ingin memastikan anak-anak kita di LPKA Palu

memahami risiko kesehatan dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas tubuh dan masa depan mereka," ujar Tenny Calvenny Soriton.

Materi inti disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Bina KB Kespri, Liana Dewi Taufiq, SE., MM, bersama fasilitator dari Forum GenRe (Generasi Berencana) Sulawesi Tengah, Moh. Rio Zidane Ferdiansyah dan Jessica Virginia Piether.

Untuk menciptakan suasana yang cair dan tidak membosankan, tim penyelenggara mengemas edukasi ini dalam tiga sesi menarik diantaranya, Ice Breaking, Permainan pembuka untuk membangun keakraban dan meningkatkan fokus anak

binaan. Penyampaian Materi, Penjelasan mendalam mengenai siklus hidup manusia dan risiko kesehatan reproduksi, khususnya pada kelompok berisiko tinggi dan Games Edukatif, Sesi evaluasi yang dikemas secara komunikatif untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

Kepala LPKA Kelas II Palu, Welli, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang terjalin. Dirinya menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga pemahaman perilaku yang bertanggung jawab.

"Kami sangat berterima kasih kepada BKKBN Sulteng atas kepeduliannya terhadap anak-anak kami. Edukasi ini adalah investasi jangka panjang bagi mereka. Kami ingin memastikan bahwa meski berada di dalam LPKA, anak-anak tetap mendapatkan informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi agar mereka mampu mengambil keputusan yang bijak dan menghindari risiko kesehatan di masa depan," ujar Welli.

Melalui kegiatan ini, diharapkan anak binaan tidak hanya bertambah wawasannya, tetapi juga mampu mengimplementasikan perilaku hidup sehat dalam keseharian mereka.

Program ini menjadi bukti nyata dukungan LPKA Palu terhadap perlindungan kesehatan dan pembinaan mental anak sebagai bagian dari kelompok remaja yang produktif.

Satgas Preemtif Imbau Keselamatan Masyarakat dalam Berkendara



PERSONEL Satgas Preemtif yang tergabung dalam Operasi Keselamatan Tinombala 2026, saat melaksanakan kegiatan preemtif di salah satu terminal wilayah Kota Palu, Kamis (5/2/2026). FOTO: DOK DITLANTAS POLDA SULTENG

SULTENG RAYA - Satuan Tugas (Satgas) Preemtif yang tergabung dalam Operasi Keselamatan Tinombala 2026 melaksanakan kegiatan preemtif dengan menasar sejumlah lokasi keramaian dan terminal di wilayah Kota Palu, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan tersebut, dipimpin langsung oleh Kasatgas Preemtif Operasi Keselamatan Tinombala 2026, Kompol Abubakar Djafar, serta didukung oleh personel yang terlibat dalam operasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Satgas Preemtif memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait

pentingnya tertib berlalu lintas guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam berkendara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Kepolisian untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut Satgas Preemtif memberikan sosialisasi dan edukasi tentang tertib berlalu lintas kepada para pengguna jalan, kendaraan roda dua agar menggunakan helm dengan baik dan benar (diklic) maupun roda empat untuk menggunakan sabuk keselamatan.

Ia juga berharap kepada para pengendara, dapat memahami tata tertib berlalulintas di jalan raya demi terwujudnya Kamseltibcarlantas selama berkendara.

Kompil Djafar juga menuturkan pihaknya membagikan brosur, serta membagikan Spanduk Operasi Keselamatan Tinombala 2026.

"Operasi Keselamatan Tinombala 2026 ini diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dan kondusif, khususnya di pusat-pusat aktivitas masyarakat," harapnya.



Bulog Siapkan 3.000 Ton Beras untuk Jamaah Haji dan Umroh 2026

SULTENG RAYA - Perum Bulog menyiapkan beras premium khusus untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026 dengan standar internasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jamaah haji Indonesia di Arab Saudi menggunakan beras nasional.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan selama ini kebutuhan beras jamaah haji Indonesia dipenuhi dari Vietnam dan Thailand. Karena itu, pemerintah meminta Bulog menyiapkan beras dengan kualitas khusus untuk konsumsi jamaah haji Indonesia.

“Haji tahun 2026 ini dipeintahkan wajib menggunakan beras nasional, beras Indonesia. Sekarang Indonesia sudah swasembada pangan, maka beras Indonesia harus digunakan untuk seluruh jamaah kita,” kata Rizal saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia menerangkan Bulog menyiapkan beras premium dengan spesifikasi tingkat pecahan maksimal 5 persen dan kadar air 14 persen atau di bawahnya. Standar tersebut lebih tinggi dibandingkan beras premium nasional yang umumnya memiliki tingkat pecahan

sekitar 15 persen.

Beras haji tersebut, lanjut Rizal, diproduksi dari gabah kering panen yang baru dipanen dari sawah. Gabah itu langsung digiling untuk menjaga kesegaran dan mutu beras sebelum dikirim ke Arab Saudi.

Untuk memenuhi standar tersebut, Bulog memanfaatkan fasilitas penggilingan milik Wilmar dengan skema pinjam pakai. Fasilitas itu digunakan setelah memperoleh izin dari Kepolisian melalui Kabareskrim.

“Wilmar alatnya canggih, sudah computerized, hasilnya bagus sekali. Kami sudah mendapat surat izin pinjam pakai, sehingga gabah bisa diolah menjadi beras premium dengan pecahan 5 persen dan kadar air di bawah 14 persen,” ujar Rizal.

Menurut Direktur Utama Bulog, beras premium tersebut disiapkan sesuai permintaan para pengelola dapur jamaah haji Indonesia



PEKERJA mengemas paket makan malam bagi jamaah calon haji Indonesia di dapur Raghaeb Catering, Makkah, Arab Saudi. FOTO: ANT

di Arab Saudi.

Seluruh dapur jamaah haji kini diwajibkan menggunakan beras Indonesia untuk konsumsi jamaah.

Bulog merencanakan pengiriman awal beras haji pada pekan ketiga Februari 2026. Volume pengiriman sesuai

permintaan mencapai 2.280 ton, dengan cadangan yang disiapkan hingga 3.000 ton untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan.

“Yang dikirim 2.280 ton. Kami siapkan 3.000 ton supaya ada cadangan jika ada kebutuhan tambahan,

termasuk untuk jamaah umroh,” jelas Rizal.

Direktur Utama Bulog memastikan pengiriman beras haji tidak mengganggu pasokan dalam negeri. Saat ini, stok beras Bulog mencapai sekitar 3,2 juta ton, dengan target penyerapan 4 juta ton

sepanjang 2026.

Selain pengiriman beras, Bulog juga menjajaki pembangunan gudang logistik di kawasan Kampung Haji, Arab Saudi. Gudang tersebut direncanakan berkapasitas awal sekitar 1.000 ton dan dapat dikembangkan

secara bertahap. Menurut Rizal, gudang itu nantinya tidak hanya menyimpan beras, tetapi juga komoditas pangan lain seperti minyak, ikan, dan daging untuk mendukung kebutuhan logistik jamaah haji dan umroh Indonesia.**RFB**

Danantara Dorong Hilirisasi Baja Bangkitkan Industri Nasional: Dok Republika

SULTENG RAYA - COO Danantara Dony Oskaria menjelaskan peta jalan (roadmap) yang ditempuh Danantara untuk mendorong kebangkitan Indonesia di sektor industri. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Dony menjelaskan Danantara telah melakukan sejumlah langkah di hulu dan hilir di sejumlah sektor industri. Salah satunya adalah hilirisasi baja yang sedang didorong untuk mendukung kebangkitan Krakatau Steel dalam industri baja.

Dony memaparkan sejumlah strategi korporasi yang tak hanya didorong untuk menyehatkan perusahaan, melainkan juga menjadikan perusahaan nasional ini sebagai pemain utama dalam industri baja dunia. “Kita ingin ke depan industri kita bertumbuh dan berkembang dengan baik, karena itu beberapa proyek sedang kami (Danantara) lakukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan baja, termasuk di dalamnya adalah kita melakukan perbaikan terhadap Krakatau Steel. Krakatau Steel hari ini sudah memasuki fase menuju sehat secara finansial dan lantas sudah melakukan intervensi dan juga perbaikan terhadap kesehatan daripada perusahaan,” kata Dony dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Rabu (4/2/2026). Salah satu proyek hilirisasi yang dilakukan Danantara tahun ini adalah pengembangan hulu (upstream) dari industri baja. “Yang akan segera kita groundbreaking di bulan depan, itu untuk penambahan kapasitas tiga juta ton daripada baja kita,” kata Dony.

Penambahan kapasitas baja juga diiringi strategi Danantara memaksimalkan penyerapan kebutuhan baja nasional. Sejumlah BUMN di sektor industri manufaktur akan menjadi penyerap

utama stok baja produksi Krakatau Steel. Industri manufaktur BUMN seperti perkapalan dan kereta api akan menggunakan baja dari Krakatau Steel sebagai penyedia di hulu. Sedangkan hasil dari produksi manufaktur kapal atau kereta api juga akan diserap BUMN di bidang penyedia jasa transportasi di sisi hilir.

“Kami mendorong terjadinya industrialisasi di beberapa aspek, yang terutama sekali berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam lingkup Danantara. Yang pertama adalah PT PAL. Kita akan mewajibkan seluruh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan manufaktur kapal yang berada dalam lingkup Danantara itu diwajibkan dilakukan di PT PAL. Tujuannya adalah untuk meningkatkan industri perkapalan kita, termasuk di dalamnya PT PIS, PT PELNI, PT ASDP ini kita wajibkan untuk melakukan manufaktur kebutuhan kapal mereka di PT PAL,” ujar Dony.

Dengan penataan industri di hulu hingga hilir diharapkan industri bisa tumbuh secara merata dan masif. “Dan sekali lagi tujuannya adalah untuk mengembangkan industri kita ke depan, sebagaimana kita yakini di dalam roadmap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa basis pertumbuhan kita ke depan adalah industri. Dengan demikian industri ini akan memberikan dampak terhadap employment dan juga tentu mengurangi impor kita,” kata Dony menegaskan.

Tak hanya PT PAL, INKA sebagai manufaktur di sektor perkeretaapian juga akan menjadi penyerap utama dari baja Krakatau Steel. “Yang kedua adalah berkaitan dengan PT INKA. PT INKA ini juga kita kembangkan, ada tiga manufaktur yang sudah kita miliki, satu di Madiun, satu di Banyuwangi dan kita akan menambah lagi di Banyuwangi. Ini kami juga mewajibkan bahwa seluruh perbaikan daripada industri kereta api kita ke depan itu akan diwajibkan dilakukan di PT INKA, termasuk juga manufakturnya,” ujar Dony.

Langkah Danantara mendorong INKA sejalan dengan roadmap transportasi yang sedang disiapkan pemerintah yang mendorong transportasi massal yang memadai untuk masyarakat. “Ini sejalan dengan roadmap transportasi yang disiapkan pemerintah bahwa mass transportation kita akan berbasis kereta api, termasuk di dalamnya kami melakukan elektrifikasi di Jakarta Cikampek, Jakarta Rangkas, dan juga Jakarta Sukabumi. Dan kami juga melakukan elektrifikasi di lima kota di Indonesia,” ujar Dony.

Dengan kebutuhan yang meningkat di sektor manufaktur, maka diharapkan industri dasar yang digunakan 100 persen produk Indonesia. Oleh karena itu roadmap dari hulu hingga hilir telah dirancang dan dijalankan Danantara demi mendorong Indonesia sebagai kekuatan industri. Ini selaras dengan arahan langsung Presiden Prabowo yang ingin Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri, termasuk di sektor industri. **RFB**

Menkeu Minta BPJS Beri Jangka Waktu Penonaktifan Data PBI JKN

SULTENG RAYA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta BPJS Kesehatan melakukan pemutakhiran data Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dengan rentang waktu tertentu guna menghindari kejutan di kalangan masyarakat.

Purbaya, dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin (9/2/2026), menyoroti tren anomali perubahan data PBI JKN pada Februari 2026.

Pada kondisi normal, rata-rata penonaktifan peserta PBI JKN berkisar satu juta jiwa. Namun, pada Februari 2026, jumlah kepesertaan yang dinonaktifkan mencapai 11 juta orang atau hampir 10 persen dari total peserta sebanyak 98 juta jiwa.

“Jadi, ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini, menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak



Purbaya Yudhi Sadewa

masuk dalam daftar lagi,” ujar Purbaya.

Pada prinsipnya, kata Menteri Keuangan, perubahan data PBI JKN merupakan upaya meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, sehingga mampu melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Karena itu, Menteri Keuangan menggarisbawahi

pemutakhiran data PBI JKN seharusnya tidak menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Bendahara negara itu menyarankan agar penonaktifan data PBI JKN dapat diterapkan secara bertahap, misalnya dengan memberikan jangka waktu dua hingga tiga bulan, yang disertai sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, masy-

arakat dapat menyiapkan langkah mitigasi terlebih dahulu sebelum kepesertaannya dinonaktifkan. “Jangan sampai yang sudah sakit, begitu mau cek, cuci darah, tiba-tiba tidak eligible atau tidak berhak,” jelasnya.

Purbaya berharap penentuan jumlah peserta PBI JKN ke depan dapat dilakukan secara hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta keberlanjutan program JKN.

Menurutnya, jika prosedur berjalan dengan jelas, seharusnya tidak ada kendala dalam kepesertaan PBI JKN.

Ia juga mengimbau BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan kendala operasional, manajemen, maupun sosialisasi yang berpotensi menimbulkan masalah dalam program JKN.

“Ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angka drastis seperti ini, diperhalus sedikit. Jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” katanya.**RFB**

BPKB HILANG	
NOPOL	: DN 1778 BD
NAMA	: DUMIASIH KHODIJAH
ALAMAT	: DUSUN IV KEL. DS. KARYA MUKTI KEC. DAMSOL KAB. DONG-GALA
MERKTYPE	: DAIHATSU TERIOS 1.5 X M/T (F800RG-GMDFJ)
NO. RANGKA	: MHKGBFA1JK000773
NO. MESIN	: 2NRF666172
NO. BPKB	: 00757226351

DIJUAL

SHM NO. 259/MAAHAS,
Jl. Dr. MOH. HATTA, KELURAHAN MAHAAS
KECAMATAN LUWUK SELATAN (D/H LUWUK),
KABUPATEN BANGGAI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH
CP : 0813-4218-9999

LORENN
TRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental MOBIL LORENN akan mendapatkan FREE MINERAL WATER & SNACK
7x Keberangkatan
Pala-Talis gratis 1 tiket

Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Toiloli
Telp/WA: 0812-3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813-4124 2003
WA : 0852-3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

DIJUAL

SHM NO. 199/MAAHAS,
Jl.TUNA (LORONG),KELURAHAN MAHAAS,
KECAMATAN LUWUK SELATAN (D/H LUWUK),
KABUPATEN BANGGAI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH
CP:0813-4218-9999

BIRO PERJALANAN UMUM
PRIMA JAYA TRAVEL

**PALU - POSO - TENTENA
BUNGKU - KENDARI**

PALU
Jl. Hangtua No. 40
Telp : 082396625339

BUNGKU (MOROWALI)
Jl. Trans Sulawesi
(Depan RSUD Morowali)
Telp : 085394579024

KENDARI
Terminal Puwatu
Telp : 082342677110

DIJUAL

SHM NO. 87/MAAHAS,
Jl.LINGKUNGAN, KELURAHAN MAHAAS
KECAMATAN LUWUK SELATAN (D/H LUWUK),
KAB UPATEN BANGGAI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH
CP:0813-4218-9999

BIRO Perjalanan Umum
CV MITRATOUNA TRAVEL/BIS

AGEN PERWAKILAN :

PALU : Jl. Tombolotutu No.50-52
Telp : (0451) 424347 - 4704707 - 427139

AMPANA : Jl. Tanjumbulu Bawah No. 9
(Dekat Tugu Ampana)
Telp : 081252984112, 081252984116
081243799363, 082122150777

Sekolah Rakyat sebagai Strategi Melawan Kemiskinan Struktural

PEMERINTAH terus memperkuat peran negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui perluasan akses pendidikan yang lebih adil dan tepat sasaran. Salah satu instrumen kebijakan yang kini dikonsolidasikan secara serius adalah Program Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tidak terjebak dalam keterbatasan struktural yang diwariskan lintas generasi.

OLEH : ANDI SAPUTRA WIJAYA)*

PROGRAM ini diposisikan bukan sekadar sebagai fasilitas pendidikan alternatif, melainkan sebagai strategi intervensi sosial yang terukur. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir sejak awal untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak lagi menjadi penghalang utama bagi anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan bermartabat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan proses seleksi siswa Sekolah Rakyat untuk tahun berjalan dengan target daya tampung mencapai 30 ribu peserta didik. Target ini disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, khususnya penyelesaian gedung-gedung permanen yang menjadi tulang punggung operasional program tersebut.

Setiap unit Sekolah Rakyat dirancang dengan kapasitas sekitar 300 siswa yang terbagi merata pada jenjang pendidikan dasar, menengah

pertama, dan menengah atas. Desain ini mencerminkan pendekatan berjenjang yang terintegrasi, sehingga peserta didik dapat menempuh pendidikan secara berkesinambungan tanpa harus berpindah sistem atau lingkungan belajar.

Di luar aspek fisik, pemerintah juga mempersiapkan ekosistem pendukung secara menyeluruh. Ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta mekanisme seleksi siswa menjadi perhatian utama agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga sejak tahap awal. Pemerintah menempatkan kualitas sebagai prasyarat mutlak, bukan konsekuensi yang menyusul kemudian.

Proses seleksi siswa Sekolah Rakyat dirancang melibatkan lintas institusi, termasuk dinas sosial, dinas pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa data calon peserta didik benar-benar valid dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. Akurasi data menjadi fondasi

agar program ini tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Sasaran utama Sekolah Rakyat difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin sesuai kategori desil terbawah. Penajaman sasaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen afirmatif, bukan program umum yang berpotensi kehilangan fokus sosialnya.

Arahan Presiden Prabowo Subianto turut mempertegas komitmen tersebut. Presiden meminta agar seluruh proses seleksi dijalankan secara transparan dan bersih dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan. Penekanan ini sekaligus menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis negara yang harus dijaga integritasnya sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Komitmen di tingkat nasional juga tercermin dari peresmian operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Sebaran ini memperlihatkan upaya pemerintah menjangkau berbagai wilayah, sekaligus membangun fondasi awal menuju perluasan skala program dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah memproyeksikan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada akhir 2026. Dari sekitar 15 ribu siswa saat ini, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30 ribu dalam waktu dekat, sebelum akhirnya berkembang menuju skala yang

jauh lebih besar sesuai visi jangka panjang.

Presiden juga menyampaikannya bahwa sasaran akhir program ini adalah membangun kampus-kampus Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga seribu murid per lokasi. Dengan pendekatan bertahap dan terukur, Sekolah Rakyat diarahkan menjadi sistem pendidikan sosial berskala nasional yang mampu menampung hingga ratusan ribu anak dari keluarga rentan.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi VIII, Atalia Praratya, memandang Sekolah Rakyat sebagai jaring pengaman sosial di bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak yang selama ini berisiko terputus dari akses belajar karena keterbatasan ekonomi.

Atalia menilai inisiatif yang diusung Kementerian Sosial ini mencerminkan kehadiran negara dalam membuka ruang pendidikan yang lebih inklusif. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta keterpaduan dengan layanan perlindungan sosial lainnya.

Menurut Atalia, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kebijakan pendidikan, perlindungan anak, dan layanan kesejahteraan sosial. Kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang

aman dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Atalia juga menyoroti pentingnya fungsi sekolah sebagai ruang yang mampu mendeteksi dini kesulitan psikososial pada anak. Pendekatan ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang perlindungan yang mencegah risiko sosial yang lebih berat.

Atalia menilai pemilihan lokasi Sekolah Rakyat juga perlu semakin selektif dengan mempertimbangkan sebaran kemiskinan yang lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Penempatan sekolah yang terlalu terpusat di perkotaan berpotensi menjauhkan akses bagi anak-anak miskin yang tinggal di desa.

Dengan pemilihan lokasi yang lebih tepat, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar menjangkau kelompok sasaran utama dan tidak menimbulkan jarak sosial maupun psikologis bagi peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan awal program sebagai instrumen pemutus kemiskinan struktural.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin negara, bukan beban yang ditanggung keluarga miskin. Dengan kebijakan yang terukur, transparan, dan berpihak, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam membangun mobilitas sosial dan masa depan generasi yang lebih setara.)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

TAJUK



Meluruskan Jalan Peradilan

REHABILITASI yang diterima mantan Dirut ASDP Ira Puspawati dan dua direksi lainnya menjadi ujung dari drama kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh BUMN angkutan air itu. Kita mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menutup drama tersebut dengan menegaskan rasa keadilan.

Ketiganya yang tidak terbukti memperkaya diri sendiri, tidak terbukti memiliki niat jahat (mens rea), dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, akhirnya bebas. Dengan keputusan pemberian rehabilitasi pula, bukan saja harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dipulihkan, melainkan juga status lainnya otomatis pulih seperti sebelum adanya perkara. Bagi Ira dkk, maka mereka pulih sebagai direksi nonaktif ASDP.

Di sisi lain, kasus itu menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar soal pemulihan nalar peradilan dan hukum di Indonesia. Kasus Ira itu, kendati tidak sepenuhnya sama, mirip dengan perkara mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

Tiga bulan lalu, lembaga peradilan kita memperlakukan diskresi atas tindakan Tom sebagai tindakan korupsi. Tom yang tidak terbukti memperkaya diri dan tidak memiliki mens rea atas kasus impor gula tersebut, juga divonis 4,5 tahun penjara. Rasa keadilan barulah tegak dengan pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo.

Adanya dua kasus serupa itu tidak bisa dianggap remeh. Kasus semacam ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, tetapi juga dapat membuat roda pemerintahan bisa-bisa jalan di tempat. Para pejabat akan ciut nyali untuk membuat keputusan karena setiap kebijakan dapat 'ditipikorkan'.

Pangkal untuk perbaikan nalar peradilan tentunya ada pada kualitas para hakim. Mereka mestinya tidak hanya berpijak pada yurisprudensi tetap dalam sistem peradilan. Para hakim juga harus jernih melihat ruang kebijakan yang legal. Ruang itu tidak sepatutnya dipandang sebagai celah hukum yang berbahaya. Aksi korporasi, selama ia bagian dari upaya menemukan solusi dan inovasi, tak patut didakwa sebagai korupsi.

Lewat kasus Ira pula kita dapat melihat kemampuan pandang yang berbeda timbang di antara para hakim. Dari tiga hakim dalam kasus itu, hanya hakim ketua Sunoto yang dapat melihat bahwa kasus tersebut bukan tindak pidana korupsi, melainkan business judgment rule yang berlaku dalam hukum korporasi.

Betul bahwa dalam kasus itu pula terdapat sederet keputusan bisnis yang tidak optimal. Sebab itu, pertanggungjawaban yang harusnya dituntut ialah gugatan perdata, sanksi administratif, atau bahkan perbaikan tata kelola perusahaan.

Sekali lagi, kasus Tom Lembong atau perkara Ira dkk harus menjadi pelajaran besar bagi penegak hukum maupun lembaga peradilan tipikor. Terus berlanjutnya penuntutan dan vonis yang tidak tepat hanya akan memunculkan narasi kriminalisasi. Itu harus segera diakhiri. **Media Indonesia

Taklimat Prabowo dan Konsolidasi Politik

DALAM dua dekade terakhir dunia mengalami kontraksi. The Global Risks Report 2025 mencatat bahwa kondisi global bergerak dalam ketidakpastian yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan dan energi, disrupsi teknologi, serta melemahnya kepercayaan antarnegara.

OLEH : ENDANG TIRTANA

DALAM situasi ini Indonesia tidak bisa mengandalkan pola pembangunan dengan pola as usual. Sebagai negara besar dengan struktur pemerintahan yang berlapis, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dalam konteks ini, langkah maju yang diperlihatkan Presiden Prabowo melalui berbagai aksi Taklimat menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

Sejak awal 2026, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan konsolidasi dengan tajuk Taklimat Awal Tahun kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang. Taklimat ini menjadi arena untuk pemeriksaan evaluasi kinerja pemerintah, sekaligus menyusun langkah strategis ke depan di tengah dinamika global yang terus bergejolak.

Presiden Prabowo Subianto kembali menyelenggarakan konsolidasi nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul Inter-

national Convention Center (SICC). Forum itu diikuti lebih dari 4.000 peserta yang terdiri atas unsur kementerian/ lembaga, gubernur, bupati/ wali kota, pimpinan DPRD, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia.

Rakornas tersebut menjadi langkah strategis sebagai upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

Di hadapan ribuan pejabat dari seluruh penjurur Tanah Air, Prabowo menyampaikan pesan. Indonesia harus melompat, bukan hanya bergerak. Seluruh jajaran pemerintahan diharapkan menjadi satu barisan yang solid untuk mendukung agenda besar memajukan Indonesia secara lebih cepat dan berdampak. Lompatan ini hanya mungkin terjadi bila terjadi sinergi antara pusat dan daerah, yang bergerak dalam irama dan visi yang sama.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Penyelarasan visi, arah kebijakan, dan agenda strategis diperlukan agar tujuan terse-

but tidak terbelah oleh perbedaan kepentingan dan kapasitas antarwilayah. Presiden Prabowo menegaskan arah kebijakan strategis pemerintah dengan satu tujuan utama, yaitu mewujudkan Indonesia yang kuat, indah, dan rakyatnya bahagia. Pembangunan ke depan harus menghasilkan dampak nyata bagi rakyat dan menggerakkan pembangunan nasional secara masif.

Kebijakan strategis pertama difokuskan pada ketahanan pangan dan energi. Swasembada pangan dipercepat melalui peningkatan produksi dan penguatan cadangan nasional, sementara kemandirian energi ditempuh melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri dan percepatan transisi energi. Kedua sektor ini diposisikan sebagai fondasi kedaulatan nasional.

Pilar berikutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dirancang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Di bidang ekonomi, pemerintah mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi diharapkan inklusif dan

berdampak, mampu menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Pembangunan berbasis wilayah juga diperkuat melalui Kampung Nelayan Merah Putih dan Gerakan Indonesia ASRI yang menekankan pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah terpadu, seiring dengan pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif, memperkuat kerja sama internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Seluruh kebijakan ini patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang diharapkan mampu menjadi lompatan pembangunan nasional. Oleh karenanya, stabilitas politik, konsistensi arah kebijakan, dan sinergi kekuatan nasional secara menyeluruh menjadi hal yang mendesak.

KONSOLIDASI POLITIK

Dalam perspektif multi-level governance, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjelaskan bahwa reformasi tata kelola yang melibatkan berbagai lapisan pemerintahan merupakan proses yang kompleks dan menuntut koordinasi intensif antaraktor. Sebab lapisan pemerintahan memiliki kepentingan yang beragam, bahkan kerap saling

bertentangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki otoritas untuk mensinergikan seluruh kekuatan melalui pendekatan tata kelola yang sistemik dan integratif, dengan mempertimbangkan kapasitas seluruh tingkatan pemerintahan.

Salah satu kuncinya adalah perbaikan manajemen publik dan menata ulang administrasi kebijakan antara pusat dan daerah. Reformasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta koordinasi lintas pemerintahan. Tanpa pembenahan tata kelola ini, lompatan pembangunan berisiko terhambat oleh birokrasi terkooptasi.

Dengan demikian, taklimat Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai upaya membangun konsolidasi politik yang berorientasi pada tujuan, bukan pada pemusatan kendali kekuasaan. Karena, lompatan pembangunan yang diharapkan sulit diwujudkan dari satu kebijakan tunggal atau satu level pemerintahan. Dibutuhkan kesadaran kolektif oleh seluruh lapisan pemerintahan dan kemampuan negara menyelarasukannya dalam satu visi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Dalam konteks ini, konsolidasi politik yang dilakukan Presiden perlu mencerminkan distribusi kewenangan yang terkoordinasi dan bertanggung jawab, bukan pada kekuasaan yang sentralistik. Penulis: Waketum DPP PSI *Jawa Pos

TMG TRIMEDIA GROUP		PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.	
PENERBIT: PT. Trimedia Sulteng Mandiri No. Rek. Bank Sulteng, An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 7282773443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6 An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI		PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.	
PERWAKILAN JAKARTTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan (Ahmad Awerus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadhan) PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP (Isi di luar tanggung jawab percetakan)		REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. STAF REDAKSI: Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Jane Lestari Parabak	
WARTAWAN HARIAN SULTENG RAYA, DIBEKALI KARTU PERS/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI		LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugraha. BIRO DONGGALA: Wahid Agus. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: Subianto. BIRO MOROWALI: Intan. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.	
		BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro) Rizal Saenong (Pemasaran). BIRO BANGGA: Pariaman T. Warda L.	
		DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. KEUANGAN: Febrianti.	
		EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk.	
		ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 TLP: 0451 4012 445 ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.	

BRI Dominasi Penyaluran Kredit Program Perumahan



PERTEMUAN BRI dengan Pemerintah Pusat membahas penyaluran KKP di Jakarta, Senin (9/2/2026). FOTO: DOK. BRI

SULTENG RAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan capaian positif dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP).

Sebagai mitra strategis pemerintah, langkah tersebut sejalan dengan dukungan BRI terhadap Asta Cita serta target Program 3 Juta Rum-

ah dalam memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati dalam pertemuan bersama Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Direktur Utama PT Permodalan Nasional

Madani (PNM) Arief Mulyadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Senin (9/2/2026).

Sri Haryati menyampaikan, realisasi penyaluran KPP secara nasional sepanjang 2026 telah mencapai Rp3.547 triliun. Dari total tersebut, BRI berkontribusi sebesar Rp1,774 triliun, atau

setara 49% dari total penyaluran KUR Perumahan nasional.

Senada, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengungkapkan, perseroan menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun sepanjang tahun 2026.

"Target tersebut didukung oleh kekuatan BRI

yang memiliki basis nasabah besar serta jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, sehingga penyaluran KPR Subsidi dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, khususnya bagi MBR," ujar Hery.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

(PKP) Maruarar Sirait turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi. Ia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan oleh BRI dari tahun ke tahun.

"Tahun 2024 ada sekitar 16 ribu unit rumah sub-

sidi yang dibiayai oleh BRI. Pada 2025, realisasinya meningkat menjadi 32 ribu unit. Tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran hingga 60 ribu unit rumah subsidi. Terima kasih sekali untuk BRI. Artinya, 60 ribu rakyat akan dapat menikmati rumah," pungkasnya. RHT

SNLIK 2026 Dipastikan Hasilkan Data Berkualitas



PEMANTAUAN SNLIK 2026 di Bekasi, Senin (9/2/2026). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai dasar utama pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

Hadir dalam kegiatan itu Ketua Dewan Komisiner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adiningsar Widyasanti.

Dijelaskan Friderica, pelaksanaan pemantauan SNLIK Tahun 2026 ini sangat penting, karena tingkat literasi dan inklusi keuangan akan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan," kata Friderica.

Dijelaskannya, untuk pertama kali SNLIK tahun ini akan bekerja sama dengan LPS sesuai dengan UU PPSK. Selain itu, survey tahun ini akan memiliki angka literasi dan inklusi keuangan tingkat provinsi.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan tiap provinsi sangat penting agar tiap provinsi tahu posisinya untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah.

Sementara itu, Anggito menyampaikan pentingnya SNLIK serta peningkatan jumlah responden secara nasional bagi LPS untuk memperoleh kualitas data yang lebih akurat dan objektif guna mendukung program literasi dan inklusi keuangan.

"Jadi tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, tahun lalu itu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi," ujar Anggito.

Anggito menegaskan, LPS akan terus mendukung dan berharap ke depan dapat menjangkau lebih banyak lagi responden, serta bers-

ama OJK dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi berdasarkan survei ini.

Pada kesempatan yang sama, Amalia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang sangat produktif antara BPS, OJK, dan LPS, yang pada 2026 telah memperluas jumlah responden hingga ke tingkat provinsi.

"Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia," kata Amalia.

Amalia mengimbau masyarakat untuk bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan, sebab kesediaan dan keterbukaan responden merupakan bagian penting dari kualitas pendataan. Ia menyampaikan bahwa kerahasiaan jawaban serta keamanan data pribadi responden sangat dijaga dan dilindungi sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

PROSES SNLIK

Dalam prosesnya, witnessing SNLIK bertujuan untuk memastikan pendataan survei dilakukan dengan baik dan benar oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL). Witnessing juga dilakukan oleh Kantor OJK Daerah dan BPS Pusat di masing-masing wilayah provinsi guna menjaga kualitas proses pendataan SNLIK 2026.

Pendataan SNLIK 2026 ini dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 18 Februari 2026 yang menasar 75.000 responden berusia 15-79 tahun di 38 provinsi, yang mencakup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan jumlah Satuan Wilayah Setempat (SLS) sebanyak 7.500 SLS.

Pendataan lapangan dilakukan oleh 2.744 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Masing-ma-

sing PPL dimaksud bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 3 wilayah SLS yang didampingi PML.

Hasil dari SNLIK 2026 ini akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2026. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu target RPJMN dengan nilai 69,35% untuk literasi keuangan dan 93,00% untuk inklusi keuangan pada tahun 2029.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 juga menempatkan inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama pembangunan nasional dengan nilai sebesar 98,00 persen pada tahun 2045. Hal ini yang menjadi latar belakang OJK melakukan SNLIK 2026 untuk mengetahui capaian

target berdasarkan Perpres dan UU tersebut.

Guna mencapai target dimaksud, OJK juga secara masif melakukan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GEN-CARKAN) bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan asosiasi.

OJK, LPS, dan BPS menegaskan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan disusun berdasarkan data yang akurat, objektif, dan merefleksikan kondisi nyata masyarakat.

Langkah ini merupakan wujud keseriusan ketiga lembaga dalam menghadirkan program yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membangun kepercayaan publik melalui transparansi, kolaborasi antarlembaga, dan penggunaan data sebagai fondasi utama penguatan ekosistem keuangan yang sehat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. RHT

35,04 Juta Keluarga Terima Bantuan Pangan

SULTENG RAYA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menggelontorkan bantuan pangan pada momen Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Bantuan tersebut ditargetkan menjangkau lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari stimulus ekonomi.

"Terkait dengan bantuan pangan untuk memperluas daya beli dan memperkuat sisi demand side, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan," ujar Airlangga dalam konferensi pers Stimulus Ekonomi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026, Diskon Tarif Transportasi, work from anywhere (WFA), dan Bantuan Pangan di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Airlangga menyampaikan bantuan pangan tersebut akan disalurkan

kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat, mulai dari keluarga sangat miskin (desil 1), keluarga miskin (desil 2), keluarga hampir miskin (desil 3), hingga keluarga rentan miskin (desil 4).

"Target penerimanya adalah 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4," ujarnya.

Terkait pendistribusian bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng tersebut, Airlangga menyebut pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp 12 triliun.

"Estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun. Bantuan ini akan mulai disalurkan pada bulan Ramadhan atau Februari. Pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat mendukung kelancaran logistik penyaluran bantuan pangan," terangnya. (RHT)



BANTUAN pangan. FOTO: RRI



Sikap Demokrat, PKS, dan NasDem soal Wacana Prabowo 2 Periode

SULTENG RAYA - Tiga partai pendukung pemerintah belum mengambil sikap soal wacana untuk kembali mendukung Presiden Prabowo Subianto maju pada periode kedua di Pilpres 2029.

Partai NasDem, PKS, dan Demokrat mengaku masih fokus mendukung pemerintah hingga akhir periode. Ketiganya belum membahas secara internal dukungan di pilpres. “Saya belum belum ada pembahasan soal itu, tetapi mandat Partai Demokrat adalah mendukung penuh kebijakan Pak Prabowo ya sampai 2029 itu selesai masa

bakti,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf di kompleks parlemen, Selasa (10/2). Saat ditanya soal kans bakal mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Prabowo, Dede bilang partainya belum ada sikap. Dia menuturkan, AHY telah memerintahkan semua kader untuk fokus



PRABOWO bersama pimpinan partai pendukung di Pilpres 2024. FOTO: CNN INDONESIA/ADI MAULANA IBRAHIM

KAKANWIL dari halaman1

apresiasi mendalam atas kunjungan perdana Dr. H. Junaidin sejak dilantik pada 30 Desember 2025 lalu. “Urusan agama adalah urusan bersama. Di Touna, perbedaan suku dan agama bukan kendala, melainkan motivasi untuk lebih maju dengan menjaga toleransi. Sinergitas lintas sektor adalah kunci pembangunan berkelanjutan,” ujar Syahrudin. Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, menegaskan pentingnya kehadiran Kakanwil di tengah masyarakat Touna. Bupati berharap kolaborasi antara Kemenag dan Pemda semakin kuat, terutama dalam mencetak dai-

dai yang mampu menyampaikan pesan keagamaan dengan santun. “Sinergitas ini penting untuk membangun manusia yang berakhlak sesuai norma agama. Kami berharap Bapak Kakanwil dapat membimbing para dai di Touna agar ceramah yang disampaikan berlandaskan keimanan dan ketakwaan, sejalan dengan visi pemerintah daerah,” tutur Bupati. Dalam arahan perdana di Bumi Sivia Patuju, Kakanwil Kemenag Sulteng Dr. H. Junaidin menekankan bahwa Touna adalah kabupaten kelima yang ia kunjungi. Kunjungan ini merupakan awal langkahnya untuk

membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan ASN Kemenag. Kakanwil mengusung filosofi kerja tim yang solid untuk mencapai visi kementerian. “Menjadi pemimpin bukan berarti menjadi Super Tim. Kemenag memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama,” tegas Junaidin. Ia juga menyampaikan beberapa poin penting bagi para ASN yakni Keikhlasan Beramal: Mengutip filosofi Surah Al-Ikhlas, ASN Kemenag wajib memiliki ketulusan dalam melayani.

Khaadimul Ummah: ASN adalah pelayan umat yang harus terus meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerjanya. Kemenag Berdampak: Slogan baru yang menekankan bahwa keberadaan ASN Kemenag harus memberikan kontribusi nyata dan keseimbangan dalam kehidupan beragama di masyarakat. Di akhir sambutannya, Kakanwil mengingatkan pentingnya metode praktis dalam merawat kerukunan, salah satunya melalui pembentukan Kampung Moderasi sebagai simbol harmoni di tengah keberagaman. ^{ENG}

mengawal Prabowo hingga akhir masa bakti. Namun, dia mengaku menghargai keputusan partai lain yang telah mengambil sikap. “Mandat dari Ketua Umum adalah kita dukung pemerintahan Pak Prabowo ya sampai selesai masa bakti. Jadi kita belum ada pembicaraan soal 2029 gitu. Kalau yang lain sih silahkan aja, itu kan hak ya,” katanya. **NASDEM SINGGUNG TINGKAT KEPUASAN** Sementara, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menganggap dukungan sejumlah partai

kepada Prabowo untuk maju kembali di periode kedua, sebagai hal wajar. Saan terutama melihat survei terakhir Indikator Politik yang mengungkap tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah nyaris menyentuh 80 persen. Namun, Partai NasDem, kata Saan, hingga saat ini belum membahas isu pencalonan presiden. Dia mengaku masih fokus mendukung Prabowo hingga akhir periode. “Dan NasDem ada dalam posisi mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo sampai nanti di akhir masa periodenya,”

ujar Saan. **KEWENANGAN MAJELIS SYURO** Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid menegaskan dukungan kepada pemerintahan Prabowo. Namun, Kholid menyebut wacana pencalonan presiden sepenuhnya kewenangan Majelis Syuro. Kata Kholid, hingga saat ini Majelis Syuro belum membahas terlebih memberikan mandat terkait dukungan pencalonan presiden. “Kami akan mengikuti terkait pilpres, hingga detik ini kami belum ada pembahasan,” ujar Kholid. ^{CNN}

Ketua FFI Ungkap Peluang Timnas Futsal Indonesia Lawan Brasil



SULTENG RAYA - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar membongkar kemungkinan sebagai penjadikannya Brasil sebagai lawan uji tanding Timnas Futsal Indonesia. Michael mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah negara yang memiliki peringkat di atas Iran. Iran merupakan lawan yang dihadapi Timnas Futsal Indonesia di final AFC Futsal 2026. Iran saat ini menempati ranking lima dunia. Empat negara di atas Iran adalah Brasil, Portugal, Spanyol, dan Argentina.

Lawan dengan kualitas tinggi ini disiapkan untuk bisa diundang saat Indonesia menggelar 4 Nations Series yang rencananya akan digelar kembali tahun ini. “Kami berharap di tahun ini Indonesia juga bisa menggelar kembali 4-Nations Series. Kemudian, ya boleh saya bocorkan sedikit, saya sudah komunikasi langsung ke beberapa federasi yang peringkatnya di atas Iran,” ujar Michael kepada awak media di Jakarta, Senin (9/2). “Saya sudah komunikasi dengan beberapa federasi yang peringkatnya di atas Iran untuk mengajak

mereka datang ke Indonesia di 4-Nations kita. Tapi jadwalnya kita masih pastikan. Negara yang mana, bisanya kapan,” katanya melanjutkan. Michael punya harapan besar terkait lawan Brasil. Bukan hanya beruji coba, Timnas Futsal Indonesia bisa juga diundang dalam turnamen yang digelar oleh negara-negara besar futsal. “Selain itu, kami juga punya harapan... Brasil itu kan mereka punya kompetisi juga, kompetisi internasional yang digelar setiap tahun. Harapan kami tahun ini Indonesia bisa diundang,” katanya. “Sudah ada komunikasi awal, tapi kan semua sedang sibuk ya, mereka sibuk Copa America, kita sibuk dengan AFC. Tapi setelah ini kami ingin follow up agar Indonesia bisa diundang ke Brasil ikut kompetisi yang diselenggarakan oleh Brasil.” ^{CNN}

DISPERINDAG dari halaman1

Ia mengemukakan masyarakat dibatasi untuk pembelian bahan pangan di operasi pasar tersebut. “Jadi yang disubsidi tetap dibatasi pembelian oleh masyarakat, sementara yang tidak dibatasi untuk bahan pangan nonsubsidi seperti bawang putih,” ucapnya. Ia menuturkan untuk masyarakat yang membeli bahan pangan hanya perlu membawa fotokopi kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP). “Pelaksanaan operasi pa-

sar murah ini memang rutin kami laksanakan jelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, tapi karena keterbatasan anggaran maka saat ini hanya fokus di 6 wilayah, salah satunya Kabupaten Sigi,” sebutnya. Richard menyebutkan masing-masing kabupaten di Sulawesi Tengah pun juga tetap melaksanakan kegiatan serupa dengan menggunakan anggaran APBD. “Jika berdasarkan laporan BPS memang terjadi kenaikan harga tetapi tidak

secara signifikan di Kabupaten Sigi ini khususnya, tentunya melalui operasi pasar murah pemerintah provinsi bisa melakukan intervensi agar stabilitas harga tetap terjaga di Kota Palu dan sekitarnya termasuk Kabupaten Sigi,” kata dia. Menurut dia, salah satu wilayah sebagai perhitungan inflasi di Sulteng adalah Kota Palu. “Kota Palu kan salah satu wilayah perhitungan inflasi maka Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong harus dijaga sta-

bilitas harga pangannya,” ujarnya. Ia berharap pelaksanaan operasi pasar tersebut dapat terdistribusi dengan tepat sasaran, merata dan bermanfaat untuk masyarakat. “Saya mengimbau pelaku usaha dan pedagang agar bisa menjaga stoknya masing-masing dan mendistribusikan kepada masyarakat serta tetap menjaga stabilitas harga, kalau ada pedagang menjual barangnya di atas HET maka segera kami telusuri penyebabnya,” sebut Richard. ^{ANT}

JEJAK dari halaman1

sisir, Pantai dan Laut, Bersih Pantaiku, Indah Lautku.” Aksi tersebut menyasar berbagai jenis sampah yang terbawa arus laut, mulai dari plastik, botol bekas, potongan kayu hingga limbah rumah tangga yang mengancam kebersihan pantai dan keberlangsungan ekosistem laut. Kasat Polairud Polres Parigi Moutong, IPTU Gigih Winanda, menegaskan ke-

giatan ini tidak sekadar bersih-bersih, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan. “Pantai dan laut bukan tempat sampah. Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga pesisir dari pencemaran. Laut yang bersih akan ber-

dampak langsung pada kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Menurut IPTU Gigih, keterlibatan lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat diharapkan terus terjaga dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Selain melakukan pembersihan, petugas juga memberikan imbauan langsung kepada warga agar tidak membuang sampah ke laut serta menjaga kebersihan pantai secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin guna mempertahankan keindahan Pantai Bambalemo sebagai aset lingkungan sekaligus potensi wisata daerah. ^{AJI}

PERTAMINA dari halaman1

risiko kerja cukup tinggi. Peresmian Program CANDI POSITIF ditandai dengan pemotongan pita serta penyampaian rincian dukungan fasilitas posyandu sebagai simbol dimulainya penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas pesisir. Melalui program ini, fungsi posyandu dikembangkan tidak hanya melayani ibu hamil dan balita, tetapi juga mencakup nelayan, lansia, remaja, serta masyarakat sekitar wilayah pesisir. Integrated Terminal Manager Bitung, Muhammad Dody Iswanto, menyampaikan bahwa posyandu memiliki peran strategis sebagai pintu masuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. “Program CANDI POSITIF diarahkan untuk memperkuat peran posyandu sebagai layanan kesehatan terintegrasi. Selain peme-

riksaan kesehatan, program ini juga mendorong edukasi PHBS dan kepedulian terhadap lingkungan pesisir agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” jelas Dody. Rangkaian kegiatan peresmian turut diisi dengan edukasi PHBS serta pemaparan dampak polusi laut terhadap kesehatan masyarakat pesisir yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Bitung Barat. Untuk mendorong partisipasi aktif warga, panitia memberikan apresiasi berupa voucher bagi peserta yang terlibat aktif dalam sesi diskusi. Usai kegiatan edukasi, masyarakat sekitar posyandu memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis sebagai langkah awal deteksi dini kondisi kesehatan. Layanan ini mendapat res-

pons positif, terutama dari nelayan dan lansia yang memiliki keterbatasan akses terhadap pemeriksaan kesehatan secara rutin. Salah satu warga pesisir, Wahyudin Rauf, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program tersebut. “Posyandu ini sangat membantu karena tidak hanya fokus pada ibu dan anak, tetapi juga memberikan layanan bagi nelayan. Pemeriksaan kesehatan gratis ini penting karena pekerjaan di laut cukup berat,” ungkapnya. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, T. Muhammad Rum, menyampaikan bahwa Program CANDI POSITIF selaras dengan komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. “Melalui Program CAN-

DI POSITIF, Pertamina Patra Niaga berkontribusi pada pencapaian SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui peningkatan akses layanan kesehatan dasar, SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) melalui layanan kesehatan terintegrasi bagi masyarakat pesisir, serta SDG 14 (Ekosistem Lautan) melalui edukasi kebersihan lingkungan dan pemahaman dampak polusi laut terhadap kesehatan,” ujar Rum. Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus mendorong program-program berbasis komunitas yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memperkuat peran posyandu sebagai simpul layanan kesehatan dan edukasi di wilayah pesisir. ^{WAN}

BOCAH dari halaman1

“Ia benar itu anak saya, kemarin ikut turnamen internasional di Jakarta,” ujar Jafar Alamri, orang tua Fajar kepada wartawan, Senin (9/2/2026). Fajar menjadi peserta termuda dalam turnamen yang digelar di kawasan PIK 2, Jakarta, pada 4-8 Februari 2026. CIO 2026 sendiri diikuti 341 peserta dari 31 negara, dengan batas usia peserta hingga 17 tahun. Jafar Alamri mengatakan ketertarikan anaknya terhadap biliar sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Saat itu, Fajar kerap memanjat meja biliar dan mencoba membidik bola. “Awalnya saya lihat dia suka manjat-manjat meja biliar, bidik-bidik bola. Saya perhatikan bidikannya sudah lurus,” terangnya. Meski sudah mengenal biliar sejak kecil, Jafar mengungkapkan latihan serius baru dilakukan sekitar 5-6 bulan terakhir, tepatnya

mulai tahun 2025. “Kalau fokus latihan serius itu baru sekitar 5-6 bulan terakhir. Sebelumnya saya biarkan saja dia mukul-mukul bola,” ujarnya. Jafar menambahkan, lingkungan kampung yang sering menggelar turnamen biliar turut mempengaruhi perkembangan Fajar. Sejauh ini, Fajar telah mengikuti sekitar tiga turnamen kecil di kampung atau home tournament. Sementara untuk turnamen besar berskala internasional, CIO 2026 menjadi pengalaman pertamanya. Meski belum meraih gelar juara karena sistem single eliminasi, Fajar langsung tampil di stage 2 atau babak utama. “Begitu main langsung masuk stage 2. Tapi karena sistemnya single eliminasi, kalah langsung gugur,” jelas Jafar. Keikutsertaan Fajar di CIO 2026 bukan melalui pendaftaran umum. Menurut Jafar, pihak

penyelenggara menghubungi langsung dan mengundang Fajar untuk tampil di ajang tersebut. CIO 2026 sendiri menghadirkan tiga turnamen internasional sekaligus, yakni Carabao International Open, Carabao Junior Open, dan Carabao International Celebrity Billiard. Ajang ini juga mencatatkan Rekor MURI sebagai turnamen biliar multikategori dengan jumlah peserta terbanyak dalam satu lokasi. Fajar yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara masih duduk di bangku PAUD. Selama ini, seluruh proses latihan dilakukan langsung oleh sang ayah. “Ke depan, saya berencana terus mengikutkan Fajar dalam berbagai kejuaraan. Untuk fokus utamanya bukan semata prestasi, melainkan pembentukan mental. Yang paling penting buat saya itu melatih mentalnya dulu. Mental itu mahal,” pungkasnya. ^(DETIK.COM)

Satgas Saber Pangan Temukan Minyak Kita di Atas HET di Palu



DIREKTUR Ketersediaan Pangan Bapanas RI Indra Wijayanto melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar tradisional di Palu, Sulteng. FOTO: ANT/HO-HUMAS POLDAS SULTENG

SULTENG RAYA-Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI menemukan minyak goreng bermerek Minyak Kita dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) saat melakukan pemantauan di pasar tradisional Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pemantauan dilakukan di Pasar Inpres Manonda yang dipimpin Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas RI Indra Wijayanto, sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang telah digelar di Poldas Sulteng.

“Secara umum harga beras dan sebagian besar komoditas pangan masih relatif stabil dan sesuai HET maupun Harga Acuan Pemerintah (HAP). Namun kami menemukan Minyak Kita dijual di atas HET, yakni melebihi Rp15.700 per liter,” kata Indra Wijayanto dalam keterangannya di Palu, Selasa (10/2/2026).

Dari hasil pemantauan,

kata dia, harga Minyak Kita di tingkat pedagang bervariasi antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, yang dinilai melanggar ketentuan HET. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan pedagang, harga beli minyak goreng dari pemasok berkisar Rp190.000 hingga Rp195.000 per karton, sehingga sejak awal sudah berada di atas ketentuan harga.

Ia mengatakan kondisi tersebut mendorong Satgas untuk menelusuri rantai distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut.

“Kami menemukan beberapa merek yang beredar. Selanjutnya akan dipro-

ses melalui Subdit Industri dan Perdagangan untuk ditelusuri siapa pemasoknya,” ujarnya. Indra juga menyototi peran Perum Bulog dalam distribusi Minyak Kita. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, Bulog memiliki kewajiban mendistribusikan Minyak Kita dengan harga HET Rp15.700 per liter dalam bentuk eceran.

“Sebanyak 35 persen distribusi Minyak Kita diserahkan kepada Bulog dan seharusnya diprioritaskan ke pasar pantauan SP2HP. Setelah itu baru dapat didistribusikan ke luar pasar. Namun di lapangan masih ditemukan perbedaan antara ketentuan dan praktik,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Satgas Saber Pangan selanjutnya akan meminta Subdit Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Poldas Sulteng untuk menelusuri toko serta pihak-pihak yang menjual minyak goreng, baik secara eceran maupun partai dengan harga di atas HET.

Sementara itu, Kasubdit I Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Poldas Sulawesi Tengah Kumpul Andihika Yudis Tira Maeyasa Dezhny mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap temuan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan menelusuri sumber dan jalur distribusinya. Jika ditemukan unsur pidana, tentu akan kami proses sesuai hukum,” katanya.

Ia menambahkan, dalam mekanisme Satgas Saber Pangan, tidak semua pelanggaran langsung masuk ranah pidana.

Menurut dia, tahapan penindakan dimulai dari teguran pertama, kedua, dan ketiga, hingga sanksi administratif berupa penutupan izin usaha.

“Namun jika ada laporan masyarakat terkait penimbunan atau pelanggaran keamanan dan mutu pangan, maka hal tersebut dapat langsung masuk ranah pidana dan akan kami proses secara hukum,” kata dia. ANT

Pemprov Soroti Pengolahan Tambang yang Non Presudaral

SULTENG RAYA- Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, mengikuti Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pihak terkait, pada Senin (9/2/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah tersebut mengangkat topik “Tata Kelola Pertambangan yang Ramah dan Berwawasan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.”

Kegiatan rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Dalam arahnya, gubernur menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menurut gubernur, saat ini regulasi terkait pengelolaan pertambangan sebenarnya sudah cukup lengkap, bahkan terdapat berbagai aturan best practice.

Namun, banyaknya aturan tersebut terkadang menimbulkan tumpang tindih, sehingga diperlukan kesepahaman bersama dalam implementasinya.

“Yang terpenting adalah kesepahaman kita terkait pengelolaan pertambangan agar dapat dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing dalam upaya perbaikan tata kelola pertambangan,” ujar gubernur.

Gubernur menegaskan, isu lingkungan menjadi salah satu dampak utama dalam pengelolaan pertambangan. Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, dampaknya bisa sangat besar, bahkan berpotensi



WAWALI Imelda mengikuti Rapat Koordinasi bersama Pemprov, Senin (9/2/2026). FOTO PPID KOMINFO PALU

menimbulkan bencana.

Selain itu, gubernur juga menyototi adanya kegiatan pertambangan yang secara administratif memiliki izin, namun pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan.

Tercatat, terdapat 153 izin mineral yang tersebar di 13 kabupaten/kota serta 565 izin non-mineral.

Melalui rapat tersebut, pemerintah akan melakukan klasifikasi terhadap kegiatan pertambangan yang secara legal memenuhi syarat, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai.

Evaluasi lapangan dinilai penting untuk memastikan kesesuaian lokasi dan aktivitas pertambangan dengan izin yang diberikan.

Gubernur juga menekankan pentingnya kerjasama yang solid dan terkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur memaparkan konsep Berani Tata Kelola Pertambangan yang Ramah dan Berwawasan Lingku-

gan melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BPK, serta perangkat teknis daerah.

Selain itu, langkah lainnya meliputi penataan perizinan sesuai regulasi dan ketentuan izin usaha pertambangan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kepemilikan pemegang izin, evaluasi terhadap pelanggaran tata ruang, lingkungan, dan perizinan berusaha di sektor pertambangan, serta penerbitan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, termasuk penindakan terhadap kegiatan pertambangan ilegal.

Kehadiran Wakil Wali Kota Palu dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mendukung pengelolaan sektor pertambangan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. ABS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU



Moh Amin Parakkasi, S.Ag., M.Hi
Ketua BPH



Prof. Dr. H. Rajindra Rum, SE., MM
Rektor



Dr. Sudirman, S.KM M. Kes
Wakil Rektor I



Dr. Burhanuddin SE, M. M
Wakil Rektor II



Dr. Budiman, S.Pd., M. Kes
Wark III



Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H, M.H
Wark IV

Unismuh Palu Kampus Inklusif untuk Semua Anak Bangsa

SULTENG RAYA-Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah perserikatan Muhammadiyah, terus mengukuhkan komitmennya sebagai kampus yang inklusif, terbuka untuk semua anak bangsa, tanpa melihat latar belakang agama, budaya, suku, bangsa, dan gender.



Rajindra

Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM, belum lama ini.

Kata dia, prinsip keterbukaan itu telah ada sejak lama di semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), termasuk di lembaga kesehatan dan pendidikan, karena hadir untuk melayani anak bangsa tanpa melihat latar belakang, sehingga tidak mengherankan jika di kampus biru Unismuh Palu, mahasiswanya terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya, dan semua mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa ada yang dibenda-bedakan. “Meski sebagai organisasi Agama Islam, namun Muhammadiyah dalam memberikan pelayanan melalui amal usahanya (AUM) tidak terbatas kepada muslim, tetapi untuk semua, termasuk

non-muslim, itu komitmen sejak awal dan akan terus dipertahankan komitmen itu,” sebut Prof Rajindra.

Bukan hanya layanan administrasi dan layanan akademik, bahkan kesempatan dalam hal berhimpun di organisasi, beasiswa dan sebagainya, semua mendapatkan perlakuan sama.

Bahkan Prof Rajindra memastikan tidak akan segan memberikan sanksi kepada dosen dan staf yang memberikan layanan diskriminatif

kepada mahasiswa, karena perbedaan keyakinan, agama, budaya, suku, bangsa, dan gender. “Kalau ada, maka akan diproses di etik, termasuk mahasiswa yang melakukan diskriminatif dengan temannya hanya karena perbedaan, akan diproses di etik, karena itu buka kebiasaan di Unismuh Palu, di sini terbuka untuk semua,” tegas Prof Rajindra.

Sekalipun katanya, di dalam proses akademik mahasiswa non Muslim tetap

diwajibkan mengikuti mata kuliah wajib seperti Al Islam Kemuhammadiyaa (AIK) dan mengikuti Baitul Arqom Mahasiswa (BAM), dengan mengikuti mata kuliah dan program tersebut, bukan berarti mahasiswa non Muslim dipaksakan untuk masuk memeluk agama Islam, melainkan hanya sekadar mengenal Islam dan Perserikatan Muhammadiyah.

“Dengan mengenal Islam dan Perserikatan Muhammadiyah, maka akan ter-

bangun toleransi, terbangun persaudaraan sesama anak bangsa, kerukunan antar umat semakin terjaga,” sebutnya. Prof Raindra menambahkan, Unismuh Palu yang saat ini memiliki akreditasi baik sekali oleh BAN-PT, terus mengupayakan memberikan layanan pendidikan yang terbaik buat seluruh mahasiswa. Ia pun membuka ruang kepada seluruh peserta didik SMA, SMK, MA sederajat di Kota Palu maupun Sulawesi

Tengah secara keseluruhan agar dapat menempuh pendidikan di kampus ini.

“Kita sangat terbuka untuk siswa dari latar belakang apa saja. Layanan pendidikan pun terus kami tingkatkan,” tambahnya.

Bagi para calon mahasiswa yang tertarik masuk ke kampus ini, dapat mengecek informasi mahasiswa baru di laman PMB Universitas Muhammadiyah Palu <https://pmb.unismuhpalu.ac.id>. ENG

